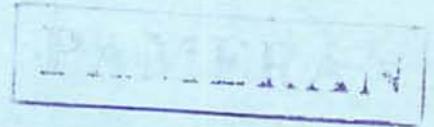


15



1 NOV 2003

LAPORAN PENELITIAN  
DOSEN MUDA TAHUN ANGGARAN 2002

**JURNALISME DAMAI PADA MEDIA CETAK:  
STUDI KASUS PEMBERITAAN KERUSUHAN SAMPIT  
DI HARIAN KOMPAS DAN JAWA POS**

Oleh:

I.G.A.K SATRYA WIBAWA, S.Sos.  
Dra. RACHMAH IDA, M.A.  
YUYUN W.I. SURYA, M.A.

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai Oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia  
DIP Nomor : 003/XXIII/1/--/2002 Tanggal 1 Januari 2002  
Kontrak Nomor : 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002  
Ditjen Dikti, Depdiknas  
Nomor Urut : 57

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

September, 2002

JURNALISTIC ETHICS



LAPORAN PENELITIAN  
DOSEN MUDA TAHUN ANGGARAN 2002

KKB  
KK-2B  
070.442  
Wib  
5

**JURNALISME DAMAI PADA MEDIA CETAK:  
STUDI KASUS PEMBERITAAN KERUSUHAN SAMPIT  
DI HARIAN KOMPAS DAN JAWA POS**

Oleh:

I.G.A.K SATRYA WIBAWA, S.Sos.  
Dra. RACHMAH IDA, M.A.  
YUYUN W.I. SURYA, M.A.

12/10/02



3000130033141

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai Oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia  
DIP Nomor : 003/XXIII/1/--/2002 Tanggal 1 Januari 2002  
Kontrak Nomor : 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002  
Ditjen Dikti, Depdiknas  
Nomor Urut : 57

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

September, 2002



**IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN  
DOSEN MUDA**

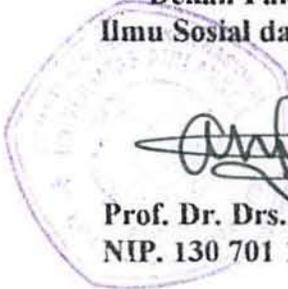
3000130033141

1. a. Judul penelitian	:	Jurnalisme Damai pada Media Cetak: Studi Kasus Pemberitaan Kerusuhan Sampit di Harian Kompas dan Jawa Pos
b. Macam penelitian	:	Analisis Isi / terapan
2. Kepala Proyek Penelitian	:	
a. Nama Lengkap dan Gelar	:	I.G.A.K. Satrya Wibawa, S.Sos
b. Jenis Kelamin	:	Pria
c. Pangkat/Golongan dan NIP	:	Asisten Ahli / IIIA NIP.132 255 154
d. Jabatan Sekarang	:	Staf pengajar Ilmu Komunikasi
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	:	FISIP Ilmu Komunikasi
f. Univ/Inst./Akademi	:	Universitas Airlangga
g. Bidang ilmu yang diteliti	:	Jurnalistik - Ilmu Komunikasi
3. Jumlah Tim Peneliti	:	2 orang
4. Lokasi Penelitian	:	Surabaya
5. Kerjasama dengan instansi lain	:	
a. Nama instansi	:	-
b. Alamat	:	-
6. Jangka Waktu Penelitian	:	5 Bulan
7. Biaya yang diperlukan	:	Rp 6.000.000,- \
		(Enam Juta Rupiah)

Surabaya, 14 oktober 2002

**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Drs. Hotman Siahaan**  
NIP. 130 701 134

**Ketua Peneliti**

**IGAK Satrya Wibawa, S.Sos**  
NIP 132 255 154

**Menyetujui:**

**Ketua Lembaga Penelitian Unair,**



**Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.**  
NIP. 130 701 125



## RINGKASAN

**JURNALISME DAMAI PADA MEDIA CETAK: STUDI KASUS PEMBERITAAN  
KERUSUHAN SAMPIT DI HARIAN KOMPAS DAN JAWA POS**

(IGAK Satrya Wibawa, Rachmah Ida, Yuyun WI Surya, 2002, 48 halaman)

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan mendasar: (1) Bagaimanakah pemberitaan Kompas dan Jawa Pos terhadap kerusuhan Sampit? (2) Media cetak manakah yang paling banyak menerapkan konsep jurnalisme damai untuk memberitakan kerusuhan Sampit? Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya dan sudah dirumuskan menjadi dua perumusan masalah, maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan pemberitaan media mengenai kerusuhan Sampit, serta untuk mendeskripsikan penerapan jurnalisme damai pada surat kabar yang diteliti yaitu Jawa Pos dan Kompas.

Pengumpulan data dilakukan dengan jalan mendokumentasikan terlebih dahulu semua berita kerusuhan Sampit yang dimuat di harian Kompas dan Jawa Pos. Kemudian digunakan lembar koding untuk memasukkan data-data yang telah dikumpulkan sesuai berdasarkan kategori yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah terkumpul data dalam bentuk koding, berikutnya dilakukan proses perhitungan dan analisis. Data yang telah terkumpulkan akan diuraikan dengan menggunakan lembar koding. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan tabulasi silang dalam tabel. Dari tabulasi tersebut, akan dilakukan analisis dan perhitungan persentase mengenai akurasi, imparialitas, Eksegerasi, dan penggunaan bahasa *pufery* dalam pemberitaan kerusuhan Sampit di harian Kompas dan Jawa Pos

Populasi penelitian ini adalah seluruh berita Kerusuhan Sampit yang dimuat di harian Kompas dan Jawa Pos dari Bulan februari sampai Maret 2001. Pemilihan jangka waktu ini berdasarkan pertimbangan pada bulan tersebut, masa meledaknya kerusuhan Sampit. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara meneliti semua pemberitaan selama periode penelitian. Pada kurun waktu itu dicari berita-berita yang sesuai dengan kriteria batasan yang disebut sebagai berita Kerusuhan Sampit. Ada kemungkinan terdapat perbedaan jumlah item berita dari masing-masing koran yang diteliti selama masa periode tadi. Perbedaan jumlah item yang diteliti dimungkinkan terjadi karena faktor jangkauan dan ukuran kelayakan berita yang

berbeda-beda dari setiap penerbitan. Namun hal itu tidak masalah, karena perhitungan analisisnya lebih ditentukan pada angka-angka persentase.

Jawa Pos dalam penelitian ini relatif lebih baik dalam menerapkan konsep *Peace journalism* dalam memberitakan kasus kerusuhan Sampit dibandingkan Kompas. Dari unsur lokasi berita, akurasi dan penggunaan puffery, Jawa Pos menunjukkan persentase yang lebih baik daripada Kompas. Jawa Pos kebanyakan memuat berita yang bersumber langsung dari lokasi kejadian, meminimalisir pencampuran fakta dan opini dalam beritanya, serta meminimalisir penggunaan bahasa puffery dan SARA dalam beritanya.

Namun, baik Kompas dan Jawa Pos sama-sama menunjukkan ketidakseimbangan pemberitaan dari kedua belah pihak yang bertikai di Sampit serta masih ada kecenderungan untuk terjebak ke dalam bentuk pembesar-besaran berita dengan penempatan sebagai headline. Hasil-hasil tersebut di atas memang tidak secara mutlak dapat dipakai sebagai satu-satunya indikator untuk menilai media tertentu berpihak atau bukan, pemanas situasi atau bukan, tetapi tetap potensial untuk mempengaruhi pembaca. Karena itu, paling tidak, sebagai awal untuk perbaikan, hasil ini dapat dijadikan salah satu pijakan untuk menerapkan konsep *Peace journalism* dalam kebijakan pemberitaan media.

Konsep *Peace journalism* dalam penelitian ini dianalisis dengan pendekatan kuantitatif, sehingga dalam beberapa hal tidak mampu menangkap fenomena dan konteks yang sifatnya lebih dalam. Misalkan, tidak dapat memaparkan ideologi media yang bisa jadi menjadi pondasi pemberitaan selama ini. Penelitian ini juga belum memperhitungkan proses pemberitaan yang sebetulnya sangat berpengaruh dalam penerbitan media. Proses pemberitaan yang melewati beberapa hal yang wajib dalam media, misalkan editing dari editor, redaktur bahasa, redaktur pelaksana hingga ke persoalan-persoalan visual. Penelitian ini hanya dapat menjelaskan apa yang menjadi output. Sehingga, disarankan untuk pengembangan hasil untuk penelitian berikutnya menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengupas dan menganalisis persoalan ini dengan lebih tajam.

(L.P. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. No.Kontrak 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002, Ditbinlitabmas-Ditjen Dikti)

## SUMMARY

### **PEACE JOURNALISM IN NEWSPAPERS: CHASE STUDY OF SAMPIT'S RIOTS NEWS COVERING IN KOMPAS DAILY AND JAWA POS DAILY**

(IGAK Satria Wibawa, Rachmah Ida, Yuyun WI Surya, 2002, 48 pages)

This research is applied in order to answer two basic questions: (1) How is the reportage of the Kompas and Jawa Pos about the dispute of Sampit? (2) Which printed media that is more liable to implement peace journalism concept while reporting the dispute in Sampit? Base on the problem background performed above, and as well as the two of the problems establishment, then the research primarily aims to observe the tendency of media reportage about the dispute of Sampit, and as well to describe the practice of *peace journalism* within the observed newspapers that is Jawa Pos and Kompas.

Data gathering applied by formerly documenting all news about the dispute of Sampit presented in Kompas and Jawa Pos. Then within the coding sheets, the data will be inserted in accordance to the category stated beforehand. After the data have been collected in the form of codes, the next application would be the counting process and analysis.

Data collected would be split up within the coding sheets. Data then will be analyzed by using cross tabulation within table. Moreover, from the tabulation performed, the analysis process will be applied and as well the percentage counting about the accuracy, impartiality, exaggeration, and puffery language usage in the reportage of the dispute of Sampit in the Kompas and Jawa Pos daily newspaper.

The population of the research is the whole reports about the clash in Sampit presented by the Kompas and Jawa Pos during the period of February throughout March 2001. The selection of the period based on the consideration that it happens to be the very moment of the eruption of the clash in Sampit.

The sample collecting applied by observing the whole reportage material during the research period. During the period, reports collected are the ones that relevant to the condition requirements, to be labeled as clash in Sampit reports. It is possible to have a different amount of news item from each newspaper. The difference of the amount of item observed is possible to

occurs because of the factor of reach and news standard of adequacy, which is varied in each edition.

Jawa Pos by this research is relatively better than Kompas, in practicing the concept of Peace Journalism while reporting the clash in Sampit. From the aspects of news location, accuracy, and the puffery usage, Jawa Pos shows a better percentage than Kompas. Jawa Pos most likely presents news that is directly source from the site of occurrence, minimize the mixing of fact and opinion, and as well minimize the puffery language usage and SARA on its report.

Even though, both Kompas and Jawa Pos show an unbalance reportage from the two elements having the clash in Sampit, and also there is still a tendency of them to be trapped in the form of hyperbolically reportage by locating the news in a headline.

The results above are not truly competent to be used as the only indicator to judge whether some media is partial or not, situation heater or not, but still it potential to influence the reader. Because of that reason, let the results be a starting point to make an improvement, and it as well could be a basic trail to practice the concept of Peace Journalism in the policy of media reporting.

The concept of *Peace Journalism* in the research is analyzed by the quantitative approach, which in a several situations, it failed to capture a deeper phenomena and behavior. For instance, it cannot be able to explain the ideology of the media, which have been the main foundation of all reportage all the time.

The research is as well not including the reportage process, which is actually very significant in the media launching. The reportage process passes thorough several authority aspects in any kind of media, such as editing by the editor, the language redactor, and the operational redactor, throughout the matters of visualization. The research only explain matters already be an output. Thus, as a recommend, for the result development within the next research, the approach will be used is the qualitative one, in order to reveal and analyze the problems in the clearer and sharper manner.

(L.P. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. No.Kontrak 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002, Ditbinlitabmas-Ditjen Dikti)

## KATA PENGANTAR

Konsep Jurnalisme damai dalam pemberitaan media menjadi signifikan perannya jika dikaitkan dengan konteks terkini di negeri ini. Kerusuhan, konflik antar etnis dan agama, persoalan sosial serta beragam masalah lain menjadi berita sehari-hari. Sadar atau tidak sadar, media massa ikut ambil bagian dalam lingkaran konflik itu. Persoalannya, peran itu dapat menjadi peredam dan dapat juga menjadi pemicu atau malah sebagai katalis dalam persoalan yang diliputnya. Dalam rangka untuk memahami penerapan konsep jurnalisme damai di media cetak, maka peneliti melakukan penelitian kuantitatif terhadap dua media yang selama ini melakukan peliputan terhadap kasus Kerusuhan Sampit.

Ucapan terima kasih terutama kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, dalam hal ini Prof.Dr.H.Sarmanu, MS selaku ketua Lembaga Penelitian, yang telah memberikan kesempatan dan dana kepada peneliti untuk mengadakan observasi di lapangan hingga penyelesaian penulisan laporan penelitian ini.

Karya ini masih jauh dari sempurna. Sehingga kekurangan yang ada di dalamnya, membuka peluang bagi siapapun untuk memberikan masukan dan kritik untuk lebih menyempurnakan dan memperbaiki karya ini lebih lanjut.

Harapan peneliti semoga laporan ini bisa menjadi masukan dan bahan kajian bagi siapapun yang memperhatikan penerapan konsep jurnalisme damai di media massa. Akhir kata, semua saran ataupun kritik dari berbagai pihak dengan senang hati dan segenap kerendahan hati, peneliti akan memperbaiki laporan ini.

Surabaya, 25 September 2002  
Peneliti

IGAK Satria Wibawa

## Daftar isi

<b>Halaman Judul</b>		
<b>Lembar Identitas dan Pengesahan</b>		
<b>Kata Pengantar</b>		
<b>Daftar Isi</b>		
<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>1</b>
	I.1. Latar Belakang Masalah	1
	I.2. Perumusan Masalah	7
<b>Bab II</b>	<b>Tinjauan Pustaka</b>	<b>8</b>
<b>Bab III</b>	<b>Tujuan dan Manfaat</b>	<b>20</b>
	III.1. Tujuan Penelitian	20
	III.2. Manfaat Penelitian	20
<b>Bab IV</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>21</b>
<b>Bab V</b>	<b>Hasil dan Pembahasan</b>	<b>29</b>
	V.1. Lokasi Berita	30
	V.2. Akurasi Berita	32
	V.3. Imparsialitas	35
	V.4. Exxagerate	37
	V.5. Puffery	39
<b>Bab VI</b>	<b>Kesimpulan dan Saran</b>	<b>45</b>
	VI.1. Kesimpulan	45
	VI.2. Saran	46
	<b>Daftar Pustaka</b>	<b>48</b>

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**



**1.1. Latar Belakang Masalah**

Kuntuhnya rezim Soeharto oleh kekuatan reformasi tahun 1998, telah banyak mengubah keadaan di Indonesia. Kalau pada masa Orde Baru gejolak masyarakat dapat ditekan oleh pemerintahan yang "kuat" dengan berbagai bentuk represinya, tidak demikian keadaannya dengan pemerintahan "sipil" setelah reformasi digulirkan. Sejak masa presiden Habibie, hingga pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid --- yang terpilih melalui mekanisme demokrasi --- kondisi stabilitas masyarakat Indonesia nampaknya belumlah kembali "normal" seperti sebelum krisis. Kerusuhan demi kerusuhan, konflik disintegrasi seperti tidak henti-hentinya terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Selain gejolak disintegrasi, dewasa ini beberapa daerah di Indonesia juga mengalami konflik sara yang berkepanjangan. Konflik antaretnis, agama dan golongan terjadi di Ambon dan sekitarnya (Maluku Selatan), serta Maluku Utara seperti di kepulauan Halmahera, Ternate dan Tidore. Konflik tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, dari awal tahun 1999 hingga sekarang yang seakan-akan tidak henti-hentinya. Hingga banyak masyarakat yang merasa jengkel, frustrasi, marah, namun juga tidak berdaya. Belum

persoalan Ambon selesai kerusuhan bernuansa SARA kembali terjadi di daerah Poso, Sulawesi Tengah. Konfliknya juga menyangkut masalah etnik dan agama, lagi-lagi korbannya adalah nyawa manusia dan harta benda. Yang terbaru adalah meledaknya kerusuhan di Sampit, Kalimantan. Kerusuhan terjadi antara etnis dayak dan Melayu melawan etnis pendatang Madura. Akibatnya, selain terjadi saling bunuh, puluhan ribu pendatang Madura terpaksa dievakuasi dari Kalimantan dan sampai sekarang belum bisa kembali.

Konflik etnis yang terjadi belakangan ini merupakan fenomena yang menarik untuk dicari tahu akar permasalahannya. Bangsa Indonesia sejak dulu merupakan bangsa yang multietnis dengan berbagai adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, sejak dulu bangsa Indonesia berjuang bersama-sama untuk mengusir penjajah dari bumi nusantara.

Indonesia bukan satu bangsa berdasarkan kesatuan etnik seperti bangsa Korea atau bangsa Ceko. Indonesia lebih mirip dengan India, Afganistan, atau Zaire. Yang mempersatukan bangsa Indonesia bukan sesuatu yang alami, melainkan tekad untuk bersama, tidak kurang, tidak lebih. Tekad itu tumbuh dalam sejarah pengalaman bersama yang sebagian merupakan sejarah penderitaan dan penindasan dan yang melahirkan pengalaman perjuangan bersama demi kemerdekaan (Suseno, 1998:47).

Hal yang patut untuk dipertanyakan sekarang adalah mengapa wacana etnisitas menjadi momok yang sangat

menakutkan dalam kehidupan berbangsa? Hal ini tidak lain karena wacana etnisitas telah dikembangkan secara sistematis oleh negara dengan berbagai konotasi yang bersifat negatif, keberagaman merupakan sumber konflik dan perpecahan, oleh karena itu harus ditinggalkan.

Dalam kaitannya dengan media, merujuk pada fakta tersebut, dalam meliput berita-berita dari daerah konflik, obyektifitas dari seorang jurnalis mutlak diperlukan. Untuk menjaga kemandiriannya, pers harus obyektif dan bersifat netral atas semua fakta yang akan dirubah menjadi informasi. Kedua hal itu menjadi sangat penting mengingat efek media sangatlah besar dalam mempengaruhi opini publik (Mc Quail, 1989:241).

Pakar komunikasi massa, De Fleur dan Everette Dennis dalam *Understanding Mass Communication* menyatakan bahwa jurnalisme obyektif adalah "*reporting format that generally separating fact from opinion, presents an emotionally detached view of news, and strives for fairnes and balance*" atau format reporting yang secara umum terpisah antara fakta dan opini, adanya pemisahan antara emosi dan maksud selalu berjuang untuk adil dan berimbang (De Fleur, 1994:635). Dengan demikian secara singkat dapat dinyatakan bahwa berita obyektif adalah berita tanpa membiarkan opini jurnalistik masuk ke dalamnya.

Banyaknya peristiwa kekerasan dan kerusuhan itu memunculkan berbagai sinyalemen. Ada yang menganggap bahwa ada kekuatan yang sengaja menciptakan kerusuhan tersebut, hingga analisis-analisis yang menganggap media massa ikut andil di dalam menciptakan ketegangan-ketegangan tersebut. Penelitian ini tidak bermaksud menguak apa dan bagaimana kerusuhan dan konflik itu terjadi, namun lebih memfokuskan pada bagaimana media massa khususnya pers, memberitakan berbagai kekerasan dan kerusuhan tersebut.

Menurut Andrew Arnow seperti dikutip oleh Nunung Prajarto dalam "Berita Dalam Sebuah Konflik" menyatakan bahwa setidaknya ada tiga posisi media dalam memberitakan konflik (Eriyanto dan Qodari, 2000: 41-42). Pertama, media sebagai *issue intensifier*, yakni media berposisi sebagai *intensifier*, media memblow up realita yang jadi isu sehingga seluruh dimensi isi menjadi transparan. Kedua, sebagai *conflict diminisher*, yakni media menenggelamkan suatu isu atau konflik. Secara sengaja media meniadakan isu tersebut, terutama bila menyangkut kepentingan media yang bersangkutan, entah kepentingan ideologis atau pragmatis. Ketiga, sebagai pengarah *conflict resolution*, yakni media menjadi mediator dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif serta mengarahkan pihak yang bertikai pada penyelesaian konflik.

Dengan peliputan media, pihak yang terlibat diharapkan memahami sudut pandang pihak lain, mengatasi prasangka dan kecurigaan serta mengevaluasi ulang sikap dasar yang terbentuk. Posisi media sebagai pengarah *conflict resolution* adalah posisi yang paling tepat untuk diterapkan serta sesuai dengan konsep *Peace Journalism*.

*Peace Journalism* merupakan sebuah alternatif baru dalam memberitakan konflik, paling tidak bagi pers di Indonesia. Disamping bersandar pada standar jurnalisisme modern, *Peace Journalism* juga memberikan peluang yang lebih besar kepada jurnalis untuk aktif ambil bagian dalam upaya solusi untuk menciptakan perdamaian di daerah-daerah yang mengalami persoalan atau konflik. *Peace Journalism* mempunyai tugas utama memetakan konflik, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, menganalisis tujuan-tujuan mereka dan membicarakan informasi yang mereka sediakan dalam agenda khusus.

Konflik etnis di Sampit terjadi dengan begitu cepat dan mampu meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat. Konflik etnis antara etnis asli (Dayak dan Melayu) dan etnis pendatang (Madura) di Sampit merupakan rangkaian dari konflik-konflik sebelumnya yang sudah marak sejak peristiwa Sanggau Ledo, Sambas, 1997 dan akhirnya terakumulasi.

Kerusuhan dipicu oleh penemuan empat mayat warga pendatang di Jalan Karya Baru, tidak jauh dari Kompleks KOMPI, Minggu (18/2) sekitar pukul 3 dini hari. Melihat warganya ditemukan sudah jadi mayat, kelompok warga merusak dan membakar sejumlah rumah sebagai pelampiasan amarah (Jawa Pos, 2001:1). Tindakan perusakan, pembakaran, dan pembunuhan kian lama kian meluas sampai ke pelosok Kotawaringin Timur. Tak kurang 469 jiwa (456 di antaranya orang Madura) menjadi korban tewas, dan 773 ruang bangunan rumah tinggal bekas dibakar. Sekitar 23 ribu orang Madura bersembunyi, dan lari mencari perlindungan ke markas polisi dan halaman kantor bupati Kotawaringin. Diperkirakan, 40.000 orang Madura dievakuasi meninggalkan tempat tinggal yang telah dihuni turun temurun dengan menggunakan kapal perang dan pengangkut TNI Angkatan Laut menuju Surabaya, Jawa Timur dan Semarang, Jawa Tengah

Rentetan berita mengenai kerusuhan Sampit menjadi santapan sehari-hari bagi media, termasuk oleh Jawa Pos dan Kompas. Dua media yang pada tahun 2000 tercatat sebagai dua media dengan oplah terbesar itu tentu saja memberikan ruang covering kasus itu. Sebagai media yang memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik, tentunya akan sangat menarik untuk mencermati apakah konsep *Peace Journalism* menjadi pedoman kedua media ini dalam memberitakan konflik Sampit.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka beberapa permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemberitaan Kompas dan Jawa Pos terhadap kerusuhan Sampit?
2. Media cetak manakah yang paling banyak menerapkan konsep jurnalisme damai untuk memberitakan kerusuhan Sampit ?

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Dalam buku *Forging War*, karangan Mark Thompson (1999), dikatakan bahwa tidak dipungkiri, konflik masyarakat sipil terjadi karena persaingan berbagai kekuatan politik. Namun media massa mempunyai peran yang besar dalam menghasilkan konflik tersebut, sebagaimana terjadi di Rwanda, Bosnia, dan juga Kosovo. Dikatakannya "All sides have sought to mobilize and manipulate public opinion. The media no longer merely comment on war, they are part of the front line". Itu adalah komentar Mark Thompson pada pemberitaan tentang perang etnik di Bosnia dan Kosovo.

Di Indonesia konflik yang terjadi memang berbeda dengan Rwanda, Bosnia maupun Kosovo, namun kekerasan konflik sipil seperti itu pun tidak mustahil bisa terjadi juga di sini. Di Indonesia media massa memanglah belum sampai pada *forging war*, membentuk perang, namun perannya dalam konflik Politik di Aceh, kerusuhan di Ambon, Poso, dan Halmahera, disinyalir acapkali memanaskan suasana. Tidak jarang berita di media massa dianggap mematangkan kondisi konflik tersebut. Khususnya jika mereka mencoba memberitakan dengan menunjukkan pihak-pihak yang dianggap bersalah pada berbagai konflik tersebut.

Mengapa pemberitaan media acapkali dianggap memanasi suasana, tak lain karena menyangkut persoalan jurnalisme media itu sendiri. Banyak media massa yang "menjual" kekerasan untuk kepentingan industri mediana. Untuk menyenangkan "pembacanya" sekaligus merupakan upaya agar isi mediana dapat laku karena pemberitaan itu. Mereka terkadang melupakan akan fanatisme masyarakat yang "begitu mudah" terpicu emosionalnya karena suatu pemberitaan.

Pemberitaan media di Indonesia tak jarang meninggalkan standard jurnalisme profesional, yaitu dalam pengungkapan fakta tidak didasari pada tuntutan etika dan jurnalisme modern. Mereka acapkali kurang memperhitungkan konsekuensi dari pemberitaan yang tidak mengikuti kaidah jurnalisme. Kaidah etika, azas imparialitas, hingga obyektivitas yang menuntut akurasi berita acapkali dilupakan. Padahal dalam setiap pemberitaan media massa senantiasa dituntut untuk memperhitungkan segala aspek jurnalisme ini, dan apabila prinsip jurnalisme itu dilakukan dengan sendirinya isi media tidak akan terkesan provokatif atau mem blow up pertentangan.

Standard jurnalisme menjadi penting, karena pada dasarnya media massa merupakan sarana manusia untuk memahami realitas. Sebab itu media massa senantiasa dituntut mempunyai kesesuaian dengan realitas dunia yang

benar-benar terjadi. Maksudnya agar gambar realitas yang ada di benak khalayak -*the world outside and the pictures in our head*, demikian istilah Lippman (1921)—tidaklah bias dikarenakan informasi media massa yang tidak kontekstual dengan realitas.

Pers atau dalam hal ini surat kabar dibutuhkan masyarakat tak lain karena informasinya, bukan kertasnya. Informasi itu sebagai dasar menentukan sikap, perilaku, atau pun respond terhadap berbagai hal, termasuk persoalan politik. Disinilah sebagai institusi, surat kabar mempunyai tanggung jawab moral terhadap kebenaran informasi. Karena etos dasar pers -menurut Magnis Suseno—tak lain adalah etos kebenaran. Kebenaran dalam pengertian etis ini adalah memberitakan keadaan sebenarnya (Suseno; 1986:122).

Dalam jurnalisme, kebenaran tidaklah bisa diklaim oleh satu pihak. Tapi harus dikonfirmasi menurut kebenaran dari pihak lain. Inilah mengapa pemberitaan di surat kabar senantiasa dituntut untuk mengungkapkan kebenaran secara *impartial*. Yaitu salah satu syarat objektivitas berita yang acap dikenal dengan istilah pemberitaan *cover both side*, dimana pers menyajikan semua pihak yang terlibat sehingga pers mempermudah pembaca menemukan kebenaran (Siebert, Peterson, Shramm; 1986:100). Selain tuntutan pemberitaan yang *fair*, pers juga dituntut melakukan pemberitaan yang

akurat, yang tidak boleh berbohong, menyatakan fakta jika itu memang fakta, dan pendapat jika itu memang pendapat (Siebert, Peterson, Shramm; 1986:99).

Sementara dalam konsepsi yang sama Everette Denis dan DeFleur dalam buku *Understanding Mass Communication*, menunjukkan bahwa pers senantiasa dituntut mengembangkan pemberitaan yang objektif, yaitu "reporting format that generally separates fact from opinion, presents an emotionally detached view of the news, and strives for fairness and balance" (DeFleur; 1994:635).

Tuntutan lain suatu pemberitaan yang ideal adalah tidak menggunakan bahasa yang mengeraskan realitas, atau *Puffery*. Media hendaknya bisa mengungkap fakta tanpa harus membuat pembacanya menjadi ingin ikut terlibat dalam konflik yang diberitakan. Sedang menurut McQuail, suatu pemberitaan yang objektif mempunyai syarat-syarat sebagaimana yang dia kemukakan dalam buku *Mass Communication Theory* bahwa "information should be objective in the sense of being accurate, honest, sufficiently complete, true to reality, realible, and separating fact from opinion. Information should be balanced and fair (impartial) ---reporting alternative perspectives in a non-sensational, unbiased way" (McQuail; 1994:148). Jadi menurut perspektif ini, informasi dikatakan objektif jika

akurat, jujur, lengkap, sesuai dengan kenyataan, bisa diandalkan, dan memisahkan fakta dengan opini. Informasi juga harus seimbang dan adil, dalam artian melaporkan perspektif-perspektif alternatif dalam sifat yang tidak sensasional dan tidak bias.

Objektifitas, betapapun sulitnya, harus diupayakan oleh insan pers. Objektifitas berkait erat dengan kemandirian pers sebagai institusi sosial. Institusi pers memang dituntut objektif dan netral atas semua fakta. Hal itu penting mengingat signifikansi efek media terhadap khalayak, sebagaimana konsepsi Lippmann di bagian muka.

Upaya menyampaikan kebenaran fakta yang akurat juga berkait dengan persoalan pemilihan bahasa. Dalam proses komunikasi bahasa bukan sekadar sarana untuk dimuat oleh pesan, tetapi pilihan bahasa memiliki arti yang sangat penting terhadap proses pemaknaan. Menurut teori *Terministic Screen* dari Burke, bahasa mempunyai makna yang amat penting. *"Term with not only focus the attention of the audience on a specific subject, but also limit the audience's perception and direct the audience though and belief system"* (Burke, 1966). Disini bahasa tidak hanya untuk memfokuskan perhatian khalayak pada masalah tertentu, tetapi juga membatasi persepsi mereka dan mengarahkannya pada cara berpikir tertentu.



Seringkali persoalan bahasa ini mencuat karena bahasa yang digunakan adalah menggunakan bahasa kekerasan, atau *Puffery*. Yaitu bahasa yang menurut Preston dan Johnston diartikan sebagai: *Blow up, exaggerate, over state, or state superlatives concerning matters of subjectives judgments and opinion..*(Presston dan Johnson, 1972:558).

Dari uraian tersebut, peran apakah yang bisa diberikan oleh media massa dalam upaya untuk ikut menciptakan perdamaian dalam konflik etnis yang demikian kompleks keadaannya? tentu saja hal ini bukanlah pertanyaan yang mudah, karena semua pekerjaan jurnalistik adalah intervensi sehingga bagaimanapun kondisinya, pers kita diharapkan bisa melakukan intervensi-intervensi untuk menciptakan suasana damai atau mencegah meluasnya eskalasi konflik-konflik seperti itu (Alawi, 2001:vii)

Dari segi tanggung jawab sosial, media massa seharusnya menjadi sebuah institusi yang benar-benar netral dan independen sehingga apa yang diberitakan oleh pers tidak dimuati oleh kepentingan-kepentingan lain selain *the right public to know* secara akurat dan berimbang. Namun pada kenyataannya, pers sesungguhnya tidak pernah menjadi entitas yang benar-benar bebas dan independen. Independensi pers senantiasa bersifat relatif, sementara, sektoral, dan

sangat dipengaruhi kondisi-kondisi struktural (Sudibyo, 2001:42).

Media massa harus memberikan porsi yang seimbang terhadap semua tafsir, perspektif dan klaim yang ada dalam masyarakat terhadap suatu persoalan tanpa terjebak dalam pemihakan-pemihakan. Disinilah profesionalisme jurnalistik akan dipertanyakan. Kondisi seperti ini tampaknya merupakan sesuatu yang sangat sulit, bahkan kadang mustahil dalam kondisi konflik karena keterbatasan akses informasi dan persoalan keselamatan jurnalis. Seperti yang diungkapkan oleh Rick Lyman, wartawan yang sudah berpengalaman di medan perang

*Reporting a news story under normal circumstances is usually a fairly straightforward proposition. You pick up the phone and you call someone. You attend a press conference. You do research in the library. Something is happening, so you go there and watch it. But sometimes, this is almost possible... There are no phones. There are no libraries. It is too dangerous to move on the streets. You are not sure if something is happening and must decide almost hourly, whether it is worth the risk to try go there to find out (Lyman, 1995:115).*

Dalam situasi konflik, tanggung jawab dan etika yang seperti apakah yang harus di emban oleh sebuah institusi media massa? Berbicara etika media, perlu memperhitungkan, media berjuang untuk bisa bertahan secara ekonomis

sangat dipengaruhi kondisi-kondisi struktural (Sudibyo, 2001:42).

Media massa harus memberikan porsi yang seimbang terhadap semua tafsir, perspektif dan klaim yang ada dalam masyarakat terhadap suatu persoalan tanpa terjebak dalam pemihakan-pemihakan. Disinilah profesionalisme jurnalistik akan dipertanyakan. Kondisi seperti ini tampaknya merupakan sesuatu yang sangat sulit, bahkan kadang mustahil dalam kondisi konflik karena keterbatasan akses informasi dan persoalan keselamatan jurnalis. Seperti yang diungkapkan oleh Rick Lyman, wartawan yang sudah berpengalaman di medan perang

*Reporting a news story under normal circumstances is usually a fairly straightforward proposition. You pick up the phone and you call someone. You attend a press conference. You do research in the library. Something is happening, so you go there and watch it. But sometimes, this is almost possible... There are no phones. There are no libraries. It is too dangerous to move on the streets. You are not sure if something is happening and must decide almost hourly, whether it is worth the risk to try go there to find out (Lyman, 1995:115).*

Dalam situasi konflik, tanggung jawab dan etika yang seperti apakah yang harus di emban oleh sebuah institusi media massa? Berbicara etika media, perlu memperhitungkan, media berjuang untuk bisa bertahan secara ekonomis

sangat dipengaruhi kondisi-kondisi struktural (Sudibyo, 2001:42).

Media massa harus memberikan porsi yang seimbang terhadap semua tafsir, perspektif dan klaim yang ada dalam masyarakat terhadap suatu persoalan tanpa terjebak dalam pemihakan-pemihakan. Disinilah profesionalisme jurnalistik akan dipertanyakan. Kondisi seperti ini tampaknya merupakan sesuatu yang sangat sulit, bahkan kadang mustahil dalam kondisi konflik karena keterbatasan akses informasi dan persoalan keselamatan jurnalis. Seperti yang diungkapkan oleh Rick Lyman, wartawan yang sudah berpengalaman di medan perang

*Reporting a news story under normal circumstances is usually a fairly straightforward proposition. You pick up the phone and you call someone. You attend a press conference. You do research in the library. Something is happening, so you go there and watch it. But sometimes, this is almost impossible... There are no phones. There are no libraries. It is too dangerous to move on the streets. You are not sure if something is happening and must decide almost hourly, whether it is worth the risk to try go there to find out (Lyman, 1995:115).*

Dalam situasi konflik, tanggung jawab dan etika yang seperti apakah yang harus di emban oleh sebuah institusi media massa? Berbicara etika media, perlu memperhitungkan, media berjuang untuk bisa bertahan secara ekonomis

sekaligus bisa tetap hidup sebagai pemberi informasi  
(Haryatmoko, 2002:4)

Pers seringkali tidak menunjukkan keberpihakannya pada nilai-nilai, terutama nilai-nilai kemanusiaan, saat dia melaporkan konflik karena berbagai kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, maupun ideologi yang tercermin dari berbagai kebijakan yang dibuat. Akibatnya pers kita seringkali terjebak dalam kompleksitas wacana konflik itu sendiri (Alawi, 2001:viii)

Sehingga prioritas utama media kemudian diberikan pada peristiwa yang mengandung konflik atau kontradiksi, melibatkan tokoh terkenal, menimbulkan banyak korban, atau peristiwa yang menggemparkan publik. Semakin besar skala peristiwa, semakin besar dampak yang ditimbulkan, atau semakin terkenal tokoh yang terlibat, semakin besar peluang untuk mendapatkan liputan media. Dalam hal ini tidak mengherankan jika bencana, perang, pertikaian, dan konflik menjadi primadona pemberitaan media (Galtung and Ruge, 1973 dalam River dkk, 1980:1)

Kita semua tahu bahwa media disamping berusaha menyampaikan opininya melalui pemberitaan dan editorialnya, media juga berperan membentuk opini publik sehingga sangat mempengaruhi penilaian publik terhadap suatu kasus atau peristiwa. Namun yang menjadi persoalan, opini publik seperti apakah yang harus dibangun oleh institusi media dalam situasi konflik?

Keberadaan jurnalis ibaratnya adalah mata dan telinga dari sebuah media untuk melaporkan fakta yang sesungguhnya dari suatu peristiwa sehingga jurnalis memiliki peran yang sangat besar dalam mengkonstruksi realitas konflik dalam berita-berita yang ditulisnya. Asumsi-asumsi dasar yang dapat digunakan untuk membahas peran wartawan dalam melaporkan konflik (Toit, 2001:xiii)

1. Wartawan memiliki kekuatan untuk membuat perubahan dan dapat memainkan peranan yang berarti dalam menciptakan kondisi-kondisi agar konflik tersebut dapat ditangani secara konstruktif.
2. Wartawan dapat mendorong pihak-pihak yang sedang bertikai untuk mencari dan memanfaatkan cara-cara damai dalam menghadapi konflik.
3. Dengan memberikan informasi yang akurat dan mendalam kepada pihak-pihak yang bertikai, wartawan dapat memberi bekal kepada pemimpin dan pengikutnya untuk membuat keputusan.
4. Wartawan dapat membantu menyalurkan informasi kepada pihak-pihak yang bertikai, dengan demikian membantu untuk memfasilitasi dialog.
5. Semakin kita mengetahui penyebab-penyebab konflik, dinamika dan penanganannya; maka kita akan makin efektif dalam laporan kita.

Jurnalis akan dihadapkan pada pilinan-pilihan yang cukup sulit dalam memberitakan sebuah konflik yang mungkin bisa memicu reaksi negatif kelompok yang lain sehingga jurnalis harus berhati-hati terhadap isi pemberitaannya.

Semua pekerjaan jurnalistik adalah intervensi. Pilihannya kemudian adalah etika dalam intervensi tersebut, dan karena itu pertanyaan yang muncul adalah, "Campur tangan apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan perdamaian?" Demikian kata Annabel McGoldrick dan Jake Lynch, wartawan Inggris penganjur *Peace Journalism* (Alawi, 2001:vii).

Dalam meliput suatu peristiwa, jurnalis pasti sangat tergantung pada kebijakan redaksional medianya dan setiap institusi media massa pasti memiliki agenda sendiri-sendiri dalam memberitakan sebuah konflik. Media massa bisa membentuk opini publik terhadap sebuah konflik, menciptakan isu-isu baru atau bahkan melegitimasi konflik itu sendiri.

Setiap berita yang disuguhkan harus dapat dipercaya dan menarik perhatian, tidak mengganggu perasaan dan pendapat pembaca. Surat kabar yang baik harus dapat menjanjikan hal-hal yang faktual apa adanya, sehingga kebenaran isi berita yang disampaikan tidak menimbulkan tanda tanya khalayak pembaca. Objektivitas menjadi sebuah nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistiknya (Rachmadi, 1990:4-5).

Menurut Profesor Johan Galtung, pelopor studi perdamaian sebagai kajian akademik, ciri-ciri jurnalisme perang adalah (Eriyanto dan Qodari, 2000:44-46):

1. Berita yang analisisnya selalu menggambarkan posisi "zero sum" alias "menang-kalah". Perdamaian dalam kerangka jurnalisme perang, didefinisikan sebagai kemenangan (victory) plus gencatan senjata (cease fire). Kerangka seperti ini mengesampingkan bahaya bahwa kemenangan dengan jalan kekerasan sebenarnya tidak betul-betul menyelesaikan masalah. Akibatnya, masalah itu bisa muncul dimasa yang akan datang.
2. Jurnalisme perang cenderung berfokus pada tindak kekerasan sebagai sebab konflik dan bukan pada upaya menggali struktur konflik yang lebih dalam.
3. Konsentrasi pada dampak fisik yang ditimbulkan perang, yaitu jumlah manusia yang meninggal atau terluka dan jumlah bangunan fisik yang dirusakkan.
4. Membagi pilak yang bertikai ke dalam dua kubu yang bermusuhan serta kebiasaan untuk memburuk-burukkan (to demonstrate) kubu lawan dan membaik-baikkan (to humanise) kubu sendiri.
5. Jurnalisme perang tidak menyukai opsi anti kekerasan, karena alternatif penyelesaian yang terakhir ini tidak memungkinkan tampilnya kemenangan mutlak salah satu pihak. Bagi media penyuka jurnalisme perang, tampaknya berita perang tak lebih dari semacam film koboi atau Rambo yang harus memuaskan selera penonton.

Pemberian tempat yang lebih besar atau dominan kepada salah satu pihak saja - tentu saja pihak yang mereka dukung.

Beberapa karakteristik Peace Journalism yang dirumuskan oleh *The Conflict and Peace Journalism Summer School* di Inggris adalah (Ida, 2000:5).

1. Orientasi jurnalisme damai adalah mengeksplorasi formasi konflik, seperti siapa saja yang terlibat dalam konflik, isu-isu apa sajakah yang muncul, orientasi kemenangan yang bersifat umum

dan sebagainya. *Peace Journalism* juga meliputi memberikan suara yang sama terhadap berbagai pihak yang terlibat; membuka ruang dan waktu; mencari penyebab dan *outcome* serta sejarah atau budaya dimana konflik tersebut terjadi dalam konteksnya; empati; pemahaman terhadap pihak yang terlibat; melihat konflik/perang sebagai permasalahan dan fokus pada aspek kemanusiaan dari segala sisi; menyarankan untuk mencegah timbulnya konflik/perang yang berkelanjutan; memfokuskan kepada efek-efek yang nyata dari hasil tindak kekerasan tersebut seperti trauma, kerusakan struktur dan budaya, dan sebagainya.

2. Orientasi kebenaran dari jurnalisme damai adalah memaparkan hal-hal yang tidak benar dari realitas konflik/perang yang terjadi dari semua sisi atau kejadian-kejadian yang tidak tercover.
3. Orientasi pada manusianya, dimana fokus *Peace Journalism* ini diarahkan pada semua penderitaan yang terjadi baik pada perempuan, anak, dan orang tua. Orientasi ini juga memfokuskan pada pemberian suara pada pihak-pihak yang tidak punya suara/tidak terdengar opininya (*voiceless*).
4. Orientasi solusi.  
Damai atau *peace* sama dengan bukan tindak kekerasan plus kreatifitas yang diutamakan adalah inisiatif-inisiatif perdamaian. Orientasi solusi konflik dalam jurnalisme damai ini juga diarahkan mencegah perang yang lain. Fokus solusinya pada penciptaan masyarakat yang damai (*peaceful society*).
5. Orientasi solusi yang ditawarkan dari jurnalisme damai adalah terjadinya resolusi, rekonstruksi, dan rekonsiliasi dalam masyarakat yang berkonflik pada khususnya.

## BAB III

### TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

#### III.1. Tujuan Penelitian

Memberikan suatu analisis deskriptif, yaitu:

1. Untuk mengetahui kecenderungan pemberitaan media mengenai kerusuhan Sampit.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan jurnalisme damai pada surat kabar yang diteliti yaitu Jawa Pos dan Kompas.

#### III.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang peran media massa dalam memberikan suasana damai kepada perasaan psikologis masyarakat yang sedang menghadapi beragam masalah, terutama konflik horizontal.

Penelitian ini juga merupakan sumbangan kongkrit dalam mensosialisasikan konsep jurnalisme damai pada media, sebagai salah satu bentuk kontribusi solusi bagi berbagai persoalan yang terjadi selama ini.

**BAB IV****METODE PENELITIAN****IV.1. Definisi Konseptual:**

Berita Kerusuhan Sampit adalah berita yang dimuat oleh surat kabar mengenai peristiwa kekerasan, yaitu penyerangan baik dengan senjata maupun tanpa senjata, yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain, yang berakibat jatuhnya korban jiwa, luka-luka, atau kerusakan harta benda. Penyerangan tersebut didasari oleh konflik kepentingan politik ataupun konflik yang didasarkan perbedaan Suku, Agama, Ras dan antargolongan (SARA) yang terjadi di kabupaten Sampit, Kalimantan Barat.

Jurnalisme Damai dalam penelitian ini diartikan sebagai penerapan jurnalisme dalam berita yang menggunakan ukuran-ukuran etis, seperti memisahkan antara fakta dan opini media, menerapkan azas imparialitas atau tidak memihak, memberitakan dengan tidak menonjol-nonjolkan kekerasan itu sendiri melalui ukuran dan penempatan yang "berlebihan", serta tidak menggunakan istilah atau bahasa yang mendorong permusuhan.

## IV.2. Kategorisasi

Jurnalisme damai dapat dioperasionalkan penerapannya dengan beberapa indikator, yaitu akurat, imparisial, menghindari *exaggerated* dalam penempatan ruang, dan penggunaan bahasa *Puffery*.

1. Untuk akurasi pemberitaan, diukur berdasar kejujuran dalam pemberitaan, yaitu ada tidaknya percampuran fakta dengan opini wartawan yang menulis berita. Konsep ini dibagi dua katagori, yaitu:

a. Ada pencampuran fakta dan opini, yaitu apabila dalam artikel berita itu terdapat kata-kata *opinionative* yang berasal dari wartawan, seperti: tampaknya, diperkirakan, seakan-akan, terkesan, kesannya, seolah, agaknya, diramalkan, kontroversi, mengejutkan, manuver, sayangnya, dan kata-kata *opinionatif* lainnya.

b. Tidak mencampur fakta dan opini, yaitu jika dalam tulisan berita tersebut tidak terdapat kata-kata *opinionative* seperti di atas.

2. Untuk subkonsep Imparsial atau ketidakberpihakan pemberitaan, adalah menyangkut

keseimbangan penulisan berita yang meliputi dua katagori:

- a. **Seimbang**, yaitu apabila berita konflik tersebut dilihat dari dua perspektif, yaitu dari masing-masing pihak yang bertikai.
- b. **Tidak seimbang**, jika perspektif pemberitaan yang dipakai hanya dari satu pihak saja. Atau tidak ada kesempatan yang sama dari masing-masing pihak yang bertikai.

Imparsialitas ini selain dilihat dari sumber berita (informan) yang dipilih wartawan, isi informasi, dan juga luas fisik berita dari masing-masing pihak. Sehingga terdapat mekanisme crosscheck pada komponen berita yang dianalisis untuk dilihat keseimbangannya.

3. Untuk mengetahui apakah berita itu dibesar-besarkan (*exaggerate*) atau tidak dilihat dari dua katagori.
  - a. Ada *exagerrate*, yaitu apabila berita itu ditempatkan sebagai berita utama (*Headlines*).
  - b. Tidak *exaggerate*, jika berita itu tidak dijadikan berita utama (bukan *Headlines*)
4. Untuk konsep apakah menggunakan bahasa *Puffery* atau tidak, dibagi dalam dua katagori, yaitu:
  - a. Menggunakan *Puffery*, yaitu apabila menggunakan bahasa yang menunjukkan kekerasan fisik dari masing-masing kelompok yang bertikai, dan menunjukkan dengan jelas pihak-pihak yang melakukan kekerasan fisik itu.

misalnya menyebut kelompok (SARA) secara jelas (Madura, Dayak, Melayu atau lainnya) dan diikuti kata-kata kekerasan seperti membantai, memusnahkan, menghancurkan, membunuh, dan lain-lainnya.

- b. Tidak menggunakan *Puffery*, yaitu apabila dalam menggambarkan konflik yang terjadi tidak menyebutkan kelompok etnis atau politik secara jelas, dan menggunakan kata-kata yang lebih netral seperti menyerang, menyerbu, dan membakar.

### IV.3. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur (katagorisasi) di atas dapat dipercaya atau diandalkan bila dipakai lebih dari satu kali untuk mengukur gejala yang sama. Katagorisasi dalam penelitian ini belum semuanya pernah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Maka perlu dilakukan uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi katagorisasi.

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara melakukan dokumentasi terlebih dahulu pada saat pengumpulan data dan kemudian memasukkannya ke dalam lembar koding sesuai dengan katagorisasi yang telah ditentukan. Kemudian seorang hakim yang telah dipilih akan melakukan uji reliabilitas terhadap katagorisasi tersebut dengan cara yang sama yang telah

dilakukan oleh peneliti. Kemudian dari kedua hasil uji reliabilitas tersebut akan diketahui berapa yang disetujui bersama oleh peneliti dan hakim. Perhitungan *reliable* tidak-nya katagorisasi akan dilakukan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh R. Holsty (Wimmer & Dominick; 2000:128), yaitu:

$$C.R. = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Keterangan:

C.R. = *Coefficient Reliability*

M = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkode (peneliti dan hakim)

N1, N2 = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode dan peneliti

Dari hasil yang diperoleh, akan ditemukan *observed agreement* (persetujuan yang diperoleh dari penelitian). Penyempurnaan untuk memperkuat hasil reliabilitas, maka digunakan rumus Scott:

$$\phi = \frac{\%Observed\ Agreement - \%Expected\ Agreement}{1 - \%Expected\ Agreement}$$

Keterangan:

*phi* = nilai keterhandalan

*Observed Agreement* = jumlah pernyataan yang disetujui oleh antarpengkode, yaitu nilai C.R.

*Expected Agreement* = persetujuan yang diharapkan atas banyaknya tema dalam suatu katagorisasi yang sama nilai matematisnya, dinyatakan dalam jumlah hasil pengukuran dari proporsi seluruh tema

Meski belum ada standar reliabilitas yang mutlak namun menurut Wimmer & Dominick, ambang penerimaan yang sering digunakan adalah 0,75 untuk yang menggunakan *phi*. Jika

kesesuaian antar penyusun kode tidak mencapai 0,75 maka katagorisasi operasional mungkin perlu dibuat lebih spesifik lagi.

#### **IV.4. Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah seluruh berita Kerusakan Sampit yang dimuat di harian Kompas dan Jawa Pos dari bulan Februari sampai Maret 2001. Pemilihan jangka waktu ini berdasarkan pertimbangan pada bulan tersebut, masa meledaknya kerusakan Sampit. Sedangkan sampel penelitian menggunakan total sampling. Artinya semua berita kerusakan Sampit yang dimuat pada periode terpilih di harian Kompas dan Jawa Pos diambil sebagai sampel penelitian.

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara meneliti semua pemberitaan selama periode penelitian. Pada kurun waktu itu dicari berita-berita yang sesuai dengan kriteria batasan yang disebut sebagai berita Kerusakan Sampit. Ada kemungkinan terdapat perbedaan jumlah item berita dari masing-masing koran yang diteliti selama masa periode tadi. Perbedaan jumlah item yang diteliti dimungkinkan terjadi karena faktor jangkauan dan ukuran kelayakan berita yang berbeda-beda dari setiap penerbitan. Namun hal itu tidak

masalah, karena perhitungan analisisnya lebih ditentukan pada angka-angka persentase.

Unit analisis pada penelitian ini adalah item berita. Item berita sebagai unit analisis mempermudah peneliti untuk memilah-milah bagian berita yang dianalisis ke dalam kategori-kategori yang sudah ditentukan, yaitu setiap item berita kerusuhan Sampit dihitung sebagai satu unit analisis. Berita yang dianalisis tersebut diambil dari berbagai halaman, baik yang ada di halaman satu ataupun halaman yang lain.

#### **IV.5. Pengumpulan dan analisis data**

Pengumpulan data dilakukan dengan jalan mendokumentasikan terlebih dahulu semua berita kerusuhan Sampit yang dimuat di harian Kompas dan Jawa Pos. Kemudian digunakan lembar koding untuk memasukkan data-data yang telah dikumpulkan sesuai berdasarkan katagori yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah terkumpul data dalam bentuk koding, berikutnya dilakukan proses perhitungan dan analisis.

Data yang telah terkumpulkan akan diuraikan dengan menggunakan lembar koding. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan tabulasi silang dalam tabel. Dari tabulasi tersebut, akan dilakukan analisis dan perhitungan

persentase mengenai akurasi, imparialitas, Eksegerasi, dan penggunaan bahasa pufery dalam pemberitaan kerusuhan Sampit di harian Kompas dan Jawa Pos

**BAB V****HASIL DAN PEMBAHASAN**

Harian Kompas dan Jawa Pos memberitakan kerusuhan Sampit pada periode bulan Februari - Maret 2001 dalam kuantitas yang berbeda. Kompas tercatat mengeluarkan 74 judul sedangkan Jawa Pos memuat 48 Judul berita. Jenis berita yang diambil sebagai sampel pada penelitian ini adalah semua berita hardnews maupun features (softnews). Artikel mengenai kerusuhan Sampit, karena tidak termasuk sebagai berita, tidak dipilih sebagai sampel.

Secara konseptual, yang dimaksud sebagai berita kerusuhan Sampit dalam penelitian ini adalah berita yang dimuat oleh surat kabar (Kompas dan Jawa Pos) mengenai peristiwa kekerasan, yaitu penyerangan baik dengan senjata maupun tanpa senjata, yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain, yang berakibat jatuhnya korban jiwa, luka-luka, atau kerusakan harta benda. Penyerangan tersebut didasari oleh konflik kepentingan politik ataupun konflik yang didasarkan perbedaan Suku, Agama, Ras dan antargolongan (SARA) yang terjadi di kabupaten Sampit, Kalimantan Barat.

Secara garis besar ada lima hal yang diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini yang memiliki porsi besar untuk dapat melihat penerapan konsep Peace Journalism.

Yaitu: Lokasi berita, Akurasi Berita, Imparsialitas Berita, Unsur Exaggerate serta Penggunaan bahasa *Puffery*. Adapun hasilnya sebagai berikut:

### V.1. Lokasi Berita

Lokasi berita yang dimaksudkan di sini adalah lokasi sumber berita itu berasal dengan kategorisasi sebagaimana yang dimunculkan pada tabel berikut:

Lokasi Berita	Jawa Pos		Kompas	
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
Sampit	15	31,3	11	14,9
Kalimantan Non Sampit	10	20,8	15	20,3
Jakarta	6	12,5	24	32,4
Madura	5	10,4	3	4,1
Jawa Timur Non Madura	10	20,8	15	20,3
Daerah Lain	2	4,2	6	8,1
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100</b>	<b>74</b>	<b>100</b>

*Sumber: Item Codingform No.1*

Sebanyak 31,3 % berita Jawa Pos mengenai kerusakan Sampit berasal langsung dari lokasi kejadian, Sampit. Daerah berikutnya dengan persentase yang sama, 20,8 % adalah dari daerah Kalimantan selain Sampit serta daerah Jawa Timur selain Madura. Sedangkan Madura, sebagai daerah asal salah satu etnis yang terlibat konflik, hanya 10,4 %. Masih kalah dibandingkan Jakarta yang mendapat porsi 12,5 %.

Sebaliknya dengan Kompas, memunculkan Jakarta sebagai lokasi sebagian berita mengenai kerusuhan Sampit dengan porsi 32,4 %. Sedangkan, pada daerah kerusuhan hanya 14,9 % dipakai sebagai lokasi berita. Malah, Madura menempati posisi terendah dengan 4,1 %. Sebaliknya, dua daerah sebagai kluster besar dari dua lokasi asal pelaku konflik, yaitu Kalimantan selain Sampit dan Jawa timur selain Madura mendapat porsi yang lebih besar, yaitu 20,3 %.

Hal ini menjadi fenomena umum dalam peliputan konflik. Faktor keamanan wartawan oleh media mau tidak mau harus diperhitungkan. Sehingga, terkadang, untuk mencari aman, sumbu berita diambil dari sumber berita yang berada di luar daerah konflik. Jakarta sejauh ini masih dianggap sebagai daerah sumber informan dengan akses yang cepat dan tentu saja aman. Daerah sumber konflik, karena dianggap tidak aman, akhirnya menjadi daerah sumber informasi berikutnya.

Kebijakan ini tentu saja patut dipertanyakan. Sebab, akurasi informasi tentu lebih baik jika sumber informasi berasal langsung dari daerah sumber konflik. Fakta akan terungkap lebih jelas dan obyektif karena sumber informasi ada di daerah konflik. Kompas dengan akses wartawan relatif lebih besar, seharusnya dapat dengan lebih leluasa menempatkan wartawan di daerah konflik. Kecenderungan Jakarta-sentris ini tentu saja tidak menyehatkan, karena

paradigma lama ini cenderung akan menimbulkan bias pemberitaan karena sumber informasi tidak langsung di daerah konflik.

Namun, bagaimanapun, Jakarta sebagai pusat kekuasaan menjadikan dia sebagai pusat informasi. Inilah yang merupakan realitas struktur antara penguasa dan media dengan melegitimasi diri sebagai sumber informasi untuk mencegah persoalan berkepanjangan.

## **V.2. Akurasi Berita**

Untuk akurasi pemberitaan, diukur berdasar kejujuran dalam pemberitaan, yaitu ada tidaknya pencampuran fakta dengan opini wartawan yang menulis berita. Konsep ini dibagi dua kategori, yaitu:

1. Ada pencampuran fakta dan opini, yaitu apabila dalam artikel berita itu terdapat kata-kata *opinionative* yang berasal dari wartawan, seperti: tampaknya, diperkirakan, seakan-akan, terkesan, kesannya, seolah, agaknya, diramalkan, kontroversi, mengejutkan, manuver, sayangnya, dan kata-kata *opinionatif* lainnya.
2. Tidak mencampur fakta dan opini, yaitu jika dalam tulisan berita tersebut tidak terdapat kata-kata *opinionative* seperti di atas.

Kata-kata yang bersifat opinionative ini cenderung akan menggiring pembaca ke dalam pola pikir wartawan. Sehingga, tidak tertutup kemungkinan terjadi bias persepsi dan opini dari pembaca dengan berita yang ditampilkan.

<b>Pencampuran Opini dan Fakta</b>	<b>Jawa Pos</b>		<b>Kompas</b>	
	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Ada	22	45,8	41	55,4
Tidak Ada	26	54,2	33	44,6
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100</b>	<b>74</b>	<b>100</b>

*Sumber: Item Codingform No.2*

Analisis menunjukkan sebagian besar berita kerusuhan Sampit yang dimuat di Jawa Pos menghindari pencampuran opini dan fakta dengan persentase 54,2 %. Sedangkan sisanya, 45,8 %, masih menunjukkan adanya opini yang dicampur ke dalam fakta yang ditulsi dalam berita. Sebaliknya dengan Kompas, setengah dari pemberitaannya (55,4 %) menunjukkan adanya opini dalam pemberitaannya. Sedangkan 44,6 % menunjukkan tidak ada pencampuran opini dan fakta.

Fakta ini menjadi menarik, lantaran secara geografis, Jawa Pos merupakan media yang ada dan dibaca oleh salah satu etnis pada kelompok yang bertikai. Sedangkan Kompas, sebaliknya dianggap sebagai representasi media bagi "semua orang". Hasil yang muncul, tentu saja relatif "menggembirakan" bagi Jawa pos, karena pencampuran opini

dengan fakta cenderung akan membuat berita menjadi berat sebelah.

Mengutip kembali pernyataan Eriyanto, bahwa:

Berita sebagai hasil konstruksi sosial wartawan, selalu melibatkan pandangan ideologi dan nilai-nilai wartawan maupun media massa yang bersangkutan. Proses bagaimana sebuah realitas dijadikan sebuah berita yang dikonsumsi masyarakat, sangat tergantung pada bagaimana realitas dipahami dan dimaknai oleh wartawan (Eriyanto, 2001:91).

Namun, bukan berarti ini menjadi pembenaran bagi media untuk memberikan opini dalam beritanya, karena akan menimbulkan bias berita dan bias makna. Seharusnya media lebih meminimalisir hal ini. Kompas edisi 19 Maret 2001 misalnya memuat berita dengan judul "Konflik Etnis di Kalteng Meluas ke Kualakapuas" diantaranya menyebutkan:

"...67 roh para leluhur yang diduga ikut serta dalam setiap..."

Berita yang sangat bias, karena selain menyebutkan persoalan roh, ternyata itupun masih dalam tingkatan "diduga". Penyebutan hal-hal yang tidak empiris dalam suasana konflik sangat tidak menguntungkan usaha memadamkan konflik. Karena bagaimanapun, wartawan sendiri tidak akan dapat memberikan pembuktian empiris kepada pembaca.

Bahasa yang ditampilkan melalui pemilihan kata-kata dan jalinan dalam kalimat tertentu akan membentuk realitas

tertentu pula. Bahasa mempengaruhi bagaimana individu memandang dunianya. Menurut Bourdieu, bahasa bukan hanya instrumen komunikasi, lebih dari itu ia adalah bagian dari suatu instrumen yang dengannya manusia mengaktualisasikan harapan-harapan, rencana-rencana dan ambisi-ambisi (Widjojo, 2001:1074). Dalam proses komunikasi bahasa bukan sekedar sarana untuk dimuati pesan, tetapi pilihan bahasa memiliki arti yang sangat penting terhadap proses pemaknaan.

Karena tanggung jawab yang dimiliki oleh sebuah lembaga pers (termasuk surat kabar) kepada masyarakat, berita yang dimuat atau disajikan haruslah dapat memberi informasi yang obyektif dan akurat, serta tidak mencampuradukkan antara fakta dan opini wartawan. Walau tidak dapat dipungkiri, berita merupakan hasil konstruksi wartawan atas suatu realitas sehingga bagaimana suatu realitas itu diubah menjadi berita, sangat tergantung pada pengalaman dari wartawan itu sendiri.

### **V.3. Imparsialitas**

Untuk subkonsep Imparsial atau ketidakberpihakan pemberitaan, adalah menyangkut keseimbangan penulisan berita yang dibagi ke dalam dua kategori:

1. **Seimbang**, yaitu apabila berita konflik tersebut dilihat dari dua perspektif, yaitu dari masing-masing pihak yang bertikai.
2. **Tidak seimbang**, jika perspektif pemberitaan yang dipakai hanya dari satu pihak saja. Atau tidak ada kesempatan yang sama dari masing-masing pihak yang bertikai.

Imparsialitas ini selain dilihat dari sumber berita (informan) yang dipilih wartawan, isi informasi, dan juga luas fisik berita dari masing-masing pihak. Sehingga terdapat mekanisme crosscheck pada komponen berita yang dianalisis untuk dilihat keseimbangannya.

Keberpihakan	Jawa Pos		Kompas	
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
Seimbang	18	37,5	9	12,2
Tidak Seimbang	30	62,5	65	87,8
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100</b>	<b>74</b>	<b>100</b>

*Sumber: Item Codingform No.3*

Pada aspek ini, baik Kompas maupun Jawa Pos sama-sama menunjukkan ketidakseimbangan pemberitaan mengenai kerusuhan Sampit. Jawa Pos menunjukkan persentase 62,5 % sedangkan Kompas 87,8 %. Hanya 37,5 % di Jawa Pos dan 12,2 % di Kompas yang beritanya relatif seimbang.

Ketidakseimbangan yang terjadi - terlepas apakah itu persoalan teknis belaka atau bukan - akan memunculkan

asumsi-asumsi yang merugikan media itu sendiri. Porsi yang lebih diberikan kepada etnis tertentu dalam suasana konflik akan memanaskan situsai karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Ketidakseimbangan itu dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Misalnya, tokoh-tokoh yang diwawancara, porsi fisik halaman yang diberikan dan ditulis, serta persoalan yang dibahas.

Ketidakeimbangan - dalam berbagai bentuknya - dapat diasumsikan sebagai "tidak memberikan ruang" yang adil kepada pihak yang bertikai secara adil. Ketidakseimbangan dapat menjadi awal prasangka keberpihakan. Artinya jika salah satu pihak mendapatkan porsi yang jauh lebih banyak dibanding yang lainnya, akan muncul prejudice bahwa media berpihak kepada salah satu yang bertikai.

#### V.4. Exaggerate

Untuk mengetahui apakah berita itu dibesar-besarkan (*exaggerate*) atau tidak dilihat dari dua katagori.

1. Ada *exagerrate*, yaitu apabila berita itu ditempatkan sebagai berita utama (*Headlines*).
2. Tidak *exaggerate*, jika berita itu tidak dijadikan berita utama (bukan *Headlines*)

Pada penelitian ini, non *Headline* masih dibagi dua lagi menjadi halaman satu tapi bukan *Headline* dan bukan halaman

satu. Pertimbangannya, walaupun bukan *Headline*, namun penempatan di halaman pertama media masih dapat menjadi pertimbangan bagian dari pembesar-besaran berita.

Penempatan Halaman	Jawa Pos		Kompas	
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
Headline	8	16,7	12	16,2
Halaman 1 Non Headline	22	45,8	16	21,6
Non Halaman 1	18	37,5	46	62,2
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100</b>	<b>74</b>	<b>100</b>

*Sumber: Item Codingform No.4*

Tabel 4 ini menunjukkan sebagian besar berita kerusuhan Sampit di Jawa Pos ditempatkan di halaman satu. 16,7 % merupakan *Headline*, dan 45,8 % merupakan bukan *Headline*. Hanya 37,5 % yang ditempatkan di halaman lainnya. Sebaliknya dengan Kompas, sebagian besar berita mengenai kerusuhan Sampit, 62,2 %, ditempatkan di halaman selain halaman satu. Hanya 16,2 % yang ditempatkan sebagai *Headline* dan 21,6 % lainnya ditempatkan di halaman satu tetapi bukan merupakan *Headline*.

Konsep *Headline* mengacu kepada berita utama yang menjadi pusat perhatian di media itu setiap harinya. Penempatan sebagai *Headline* tentunya harus melalui pertimbangan-pertimbangan khusus. Antara lain, adalah persoalan nilai berita (*news value*). Semakin tinggi nilai

berita maka makin besar kemungkinan sesuatu berita ditempatkan sebagai *Headline*.

Konsekuensi penempatan suatu berita sebagai *Headline* adalah nilai kepentingan dari berita itu menjadi tinggi, menjadi fokus perhatian pembaca dan secara psikologis akan dianggap sebagai "sesuatu yang terpenting" pada hari itu. Dalam konsep *Peace Journalism*, penempatan berita konflik sebagai *Headline* menjadi faktor yang kurang menguntungkan. Apalagi jika ditambah persoalan lain, misalkan menggunakan kata-kata *Puffery* atau bersifat berat sebelah. Audience yang memiliki keterikatan akan semakin terpancing untuk melakukan perlawanan-perlawanan yang akan merugikan proses perdamaian.

Penempatan berita konflik Sampit bukan sebagai *Headline* akan sangat berperan untuk mereduksi dan menyejukkan suasana yang panas. Penempatan di halaman satu pun sesungguhnya masih berperan untuk "memanaskan" situasi, walau tidak setinggi sebagai *Headline*.

### **V.5. Puffery**

Untuk konsep apakah menggunakan bahasa *Puffery* atau tidak, dibagi dalam dua katagori, yaitu:

1. Menggunakan *Puffery*, yaitu apabila menggunakan bahasa yang menunjukkan kekerasan fisik dari masing-masing

kelompok yang bertikai, dan menunjukkan dengan jelas pihak-pihak yang melakukan kekerasan fisik itu. misalnya menyebut kelompok (SARA) secara jelas (Madura, Dayak, Melayu atau lainnya) dan diikuti kata-kata kekerasan seperti membantai, memusnahkan, menghancurkan, membumihanguskan, dan lain-lainnya.

2. Tidak menggunakan *Puffery*, yaitu apabila dalam menggambarkan konflik yang terjadi tidak menyebutkan kelompok etnis atau politik secara jelas, dan menggunakan kata-kata yang lebih netral seperti menyerang, menyerbu, dan membakar.

Untuk lebih memperjelas, komponen pertama (menggunakan *Puffery*) dipilah lagi ke dalam dua aspek, yaitu menggunakan kata *Puffery* dan menyebutkan unsur SARA dan menggunakan kata *Puffery* tapi tidak menyebutkan unsur SARA. Pembagian ini dilakukan karena dalam perkembangannya, banyak berita yang tidak menyebutkan unsur SARA atau berusaha meminimalkan identitas langsung pihak yang bertikai tapi tetap menggunakan kata-kata yang termasuk ke dalam kategori *Puffery*.

Penggunaan Bahasa <i>Puffery</i>	Jawa Pos		Kompas	
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
Ya, Menyebut Unsur SARA	15	31,3	37	50
Ya, Tidak Menyebut Unsur SARA	15	31,3	15	20,3
Tidak Sama Sekali	18	37,5	22	29,7
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100</b>	<b>74</b>	<b>100</b>

*Sumber: Item Codingform No.5*

Tabel 5 menunjukkan baik Kompas maupun Jawa Pos masih menggunakan unsur *Puffery* dalam memberitakan kerusuhan Sampit, hanya saja dengan persentase berbeda-beda. 31,3 % berita di Jawa Pos menggunakan unsur *Puffery* dan menyebutkan unsur SARA. Kompas malah menunjukkan persentase yang lebih besar, yaitu setengah (50 %) dari total pemberitaannya.

Untuk kategori penggunaan bahasa *Puffery* namun tidak menyebutkan unsur SARA, Jawa Pos mencatatkan 31,3 % sedangkan Kompas mencapai 20,3 %. Hanya 37,5 % dari berita Jawa Pos dan 29,7 % berita Kompas mengenai kerusuhan Sampit yang tidak menggunakan bahasa *Puffery* dan tidak menyebutkan unsur SARA.

Sebagai media yang secara geografis dekat dengan salah satu etnis yang terlibat konflik, Madura, Jawa Pos cukup terpuji untuk meminimalisir penggunaan bahasa yang memperkeruh suasana, setidaknya dibandingkan dengan Kompas. Dengan mengutip kembali pernyataan Andrew Arnow seperti

dikutip oleh Nunung Prajarto dalam "Berita Dalam Sebuah Konflik" menyatakan bahwa setidaknya ada tiga posisi media dalam memberitakan konflik (Eriyanto dan Qodari, 2000: 41-42). Pertama, media sebagai *issue intensifier*, yakni media berposisi sebagai *intensifier*, media memblow up realita yang jadi isu sehingga seluruh dimensi isi menjadi transparan. Kedua, sebagai *conflict diminisher*, yakni media menenggelamkan suatu isu atau konflik. Secara sengaja media meniadakan isu tersebut, terutama bila menyangkut kepentingan media yang bersangkutan, entah kepentingan ideologis atau pragmatis. Ketiga, sebagai pengarah *conflict resolution*, yakni media menjadi mediator dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif serta mengarahkan pihak yang bertikai pada penyelesaian konflik.

Sejujurnya, peneliti dengan data kuantitatif yang ada, belum dapat menilai peran manakah yang dimainkan oleh Jawa Pos dan Kompas dengan terapatnya perbedaan mendasar pada unsur penggunaan *Puffery* ini. Kajian yang lebih dalam akan bisa didapatkan melalui penelitian kualitatif. Namun, tabel silang berikut, mungkin akan dapat membantu menjelaskan. Tabel silang berikut tidak bermaksud untuk mencari hubungan antar variabel, tapi hanya melihat kecenderungan antara variabel *exaggerate* dan *Puffery*.

Tabel 6. Tabel Silang Puffery dan Exxagerate Jawa Pos

Puffery \ Exxagerate	Ya, Menyebut Unsur SARA		Ya, Tidak Menyebut Unsur SARA		Tidak sama sekali	
	F	%	F	%	F	%
Headline	1	6,7	4	26,7	3	13,7
Hal.1 Non Headline	10	66,7	8	53,3	4	22,2
Non halaman 1	4	26,7	3	20	11	61,1
Total	15	100	15	100	18	100

Sumber: Item codingform no 4 &amp; 5

Tabel 6. Tabel Silang Puffery dan Exxagerate Kompas

Puffery \ Exxagerate	Ya, Menyebut Unsur SARA		Ya, Tidak Menyebut Unsur SARA		Tidak sama sekali	
	F	%	F	%	F	%
Headline	9	24,3	2	13,3	1	4,5
Hal.1 Non Headline	9	24,3	3	20	4	18,2
Non halaman 1	19	51,4	10	66,7	17	77,3
Total	37	100	15	100	22	100

Sumber: Item codingform no 4 &amp; 5

Dari tabel ini terlihat dari 15 berita Jawa Pos yang mengandung unsur *Puffery* dan menyebut SARA. hanya 6,7 % yang merupakan *Headline*. Bandingkan dengan Kompas, untuk kategori yang sama tercatat hingga 24,3%. Yang dimuat di halaman 1 tapi bukan *Headline*, Jawa Pos mencapai 66,7% sedangkan Kompas 24,3%. Kemudian, yang dimuat bukan di halaman 1 untuk Jawa Pos tercatat hanya 26,7% sedangkan Kompas mencapai 51,4%.

Untuk berita yang bersih dari unsur *Puffery* dan SARA, 16,7 % yang diangkat sebagai *Headline* oleh Jawa Pos, dan Kompas lebih sedikit lagi, hanya 4,5%. Mengacu kepada

konsep *Peace Journalism*, idealnya, berita yang bersih dari unsur *Puffery* dan SARA, lebih banyak diangkat sebagai *Headline*. Dengan konsep itu, media tetap menginformasikan fakta tanpa harus ikut memanaskan suasana.

Media berperan sebagai "pemanas" suasana akan sangat tampak ketika memunculkan *Headline* yang berbahasa agresif sekaligus menyinggung SARA yang masih sangat sensitif di negeri ini. Lima peran media yang disampaikan oleh Toit di bawah ini seharusnya menjadi pertimbangan ketika memutuskan untuk menempatkan sebuah berita yang "tidak bersih" dari *Puffery* dan SARA sebagai *Headline*.

1. Wartawan memiliki kekuatan untuk membuat perubahan dan dapat memainkan peranan yang berarti dalam menciptakan kondisi-kondisi agar konflik tersebut dapat ditangani secara konstruktif.
2. Wartawan dapat mendorong pihak-pihak yang sedang bertikai untuk mencari dan memanfaatkan cara-cara damai dalam menghadapi konflik.
3. Dengan memberikan informasi yang akurat dan mendalam kepada pihak-pihak yang bertikai, wartawan dapat memberi bekal kepada pemimpin dan pengikutnya untuk membuat keputusan.
4. Wartawan dapat membantu menyalurkan informasi kepada pihak-pihak yang bertikai, dengan demikian membantu untuk memfasilitasi dialog.
5. Semakin kita mengetahui penyebab-penyebab konflik, dinamika dan penanganannya; maka kita akan makin efektif dalam laporan kita.

Persoalannya bisa jadi, mampukah wartawan menempatkan idealisme ini diatas kepentingan "pasar" untuk meraup sebanyak mungkin pembaca?

## Bab VI

### Kesimpulan dan Saran

#### VI.1 Kesimpulan

Peace journalism sebagai sebuah konsep baru dalam jurnalisme Indonesia sebetulnya sangat tepat diterapkan pers Indonesia untuk membantu mengatasi beragam konflik SARA yang sedang terjadi. Namun, secara praktikal, media masih kesulitan untuk konsisten. Bisa jadi, ini karena media masih belum memahami konsepnya dengan benar, atau karena persoalan lain yang sifatnya internal- eksternal.

Jawa Pos dalam penelitian ini relatif lebih baik dalam menerapkan konsep *Peace Journalism* dalam memberitakan kasus kerusuhan Sampit dibandingkan Kompas. Ini menjadi menarik karena dalam beberapa hal, Jawa Pos sebetulnya lebih mungkin untuk mengabaikan konsep *Peace Journalism*, daripada Kompas yang selama ini dikenal memiliki reputasi dan citra tertentu bagi pembaca media di Indonesia.

Dari unsur lokasi berita, akurasi dan penggunaan *Puffery*, Jawa Pos menunjukkan persentase yang lebih baik daripada Kompas. Jawa Pos kebanyakan memuat berita yang bersumber langsung dari lokasi kejadian, meminimalisir pencampuran fakta dan opini dalam beritanya, serta meminimalisir penggunaan bahasa *Puffery* dan SARA dalam beritanya.

Namun, baik Kompas dan Jawa Pos sama-sama menunjukkan ketidakseimbangan pemberitaan dari kedua belah pihak yang bertikai di Sampit serta masih ada kecenderungan untuk terjebak ke dalam bentuk pembesar-besaran berita dengan penempatan sebagai *Headline*.

Hasil-hasil tersebut diatas memang tidak secara mutlak dapat dipakai sebagai satu-satunya indikator untuk menilai media tertentu berpihak atau bukan, pemanas situasi atau bukan, tetapi tetap potensial untuk mempengaruhi pembaca. Karena itu, paling tidak, sebagai awal untuk perbaikan, hasil ini dapat dijadikan salah satu pijakan untuk menerapkan konsep *Peace Journalism* dalam kebijakan pemberitaan media.

## VI.2. Saran

Konsep *Peace Journalism* dalam penelitian ini dianalisis dengan pendekatan kuantitatif, sehingga dalam beberapa hal tidak mampu menangkap fenomena dan konteks yang sifatnya lebih dalam. Misalkan, tidak dapat memaparkan ideologi media yang bisa jadi menjadi pondasi pemberitaan selama ini.

Penelitian ini juga belum memperhitungkan proses pemberitaan yang sebetulnya sangat berpengaruh dalam penerbitan media. Proses pemberitaan yang melewati beberapa

hal yang wajib dalam media, misalkan editing dari editor, redaktur bahasa, redaktur pelaksana hingga ke persoalan-persoalan visual. Penelitian ini hanya dapat menjelaskan apa yang menjadi output. Sehingga, disarankan untuk pengembangan hasil untuk penelitian berikutnya menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengupas dan menganalisis persoalan ini dengan lebih tajam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burke, Keneth,  
1966 *Language as Simbolic Action*, , Barkley,  
University of California Press.
- Dahlan, Alwi,  
1993, *Kemandirian Editorial*, dalam *Tajuk-Tajuk*  
dalam *Terik Matahari*, Surabaya Penerbit Surabaya  
Post, .
- DeFleur, Melvin., & Ball Rokeach, Sandra,  
1994, *Understanding of Mass Communication*, New  
York: Longman Inc, .
- Eryanto,  
1999, *Metodologi Polling*, *Memberdayakan*  
*Suara Rakyat*, Bandung : PT Remadja Rosda Karya,
- Kerlinger, Fred.,  
1975, *Foundation of Behavior Research*, New  
York: Rinehart & Winston,
- McQuail, Denis.,  
1994, *Mass Communication Theories*, Fourth  
editions, London: Sage Publications, .
- Meyer, Philip.,  
1973, *Precision Journalism: A Reporter's*  
*Introduction to Social Science Methods*, Bloomington,  
Indiana University Press.
- Scramm, Wilbur., & Roberts, F Donald.,  
1974, *The Process and Effect of Mass*  
*Communication*, Urbana: University of Illinois Press,
- Siebert, Fred., Petersen, & Schramm, Wilbur,  
1986, *Empat Teori Pers*, Jakarta: PT Gramedia,
- Strentz, Herbert.,  
1993, *Reporter dan Sumber Berita: Persekongkolan*  
*dalam Mengemas dan Menyesatkan Berita*, Jakarta: PT  
Gramedia.
- Suseno, Franz, Magnis,

1986, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia, .

Wimer, Roger, D., & Dominick, Josep, R.,  
2000, *Mass Media Research*, Six Edition, New York:  
Wadsworth Publishing Company, .

1-1 NOV 2003

PAMERAN

8005 VOL 0-1

